



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARDA DARABA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **204381**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.593.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/132 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20.6 m²/16.95 m² di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m²/84 m² di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 20.6 m²/16.95 m² di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m²/122 m² di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 373.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 428 m²/256 m² di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 250.5 m²/157.5 m² di BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
8. Tanah Seluas 1126 m² di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 310.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 194.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	90.192.070
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.187.692.070
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.187.692.070

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.